

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JATYOSO
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat disusun. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Semoga dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Jatiyoso di dalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Karanganyar, September 2025

Plt. Camat Jatiyoso
Kabupaten Karanganyar



MAHMUD AZIS ARIFIN, S.K.M., M.M.

Pejabat I

NIP. 197312101998031008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II-14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi.....	III-3
3.3. Arah Kebijakan	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-20
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2. Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Sesuai Pendidikan Tahun 2024	II-3
Tabel 2.3.	Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	II-4
Tabel 2.4.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.5.	Tabel Capaian Anggaran Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.6.	Permasalahan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar	II-12
Tabel 2.7.	Isu Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	II-13
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2.	Tahapan Rencana Strategis.....	III-5
Tabel 3.3.	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 4.1.	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jatiyoso	IV-4
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-13
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-18
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I-2
Gambar 3.1.	Tema Prioritas Pembangunan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026-2030	II-6

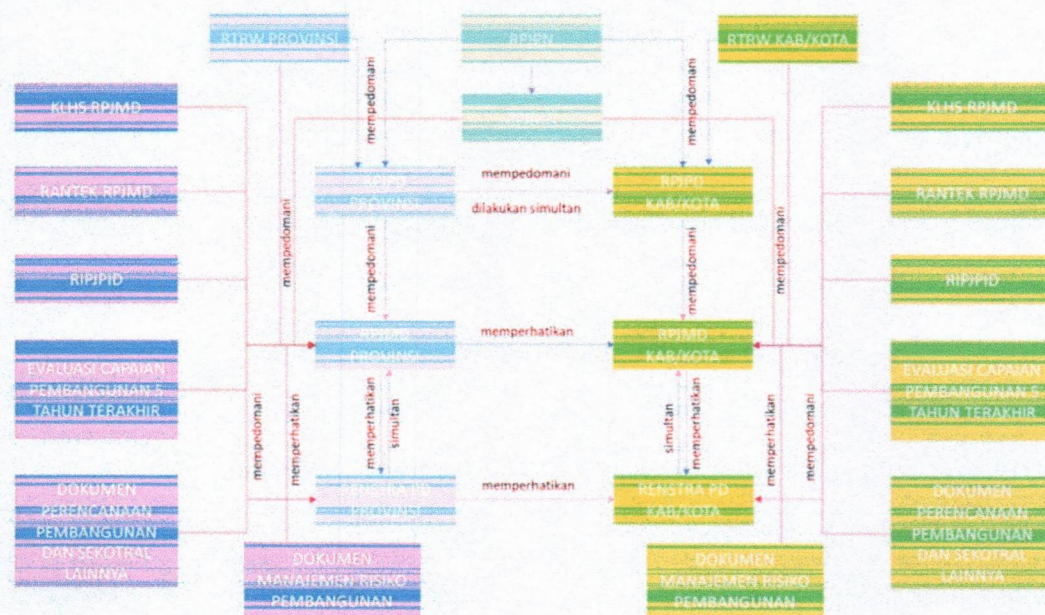
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Kecamatan Jatiyoso dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan fasilitasi pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan.

Renstra ini disusun berdasarkan kerangka hukum yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya pembangunan yang direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang secara teknis mengarahkan proses penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan di daerah.

Dokumen ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. RPJMD tersebut menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis agar sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah, kedudukan Renstra Perangkat Daerah memiliki posisi strategis yang berfungsi menghubungkan perencanaan makro dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih teknis dan operasional.



Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan, Kecamatan Jatiyoso memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah melalui fungsi koordinasi lintas sektor, fasilitasi kegiatan pembangunan, serta pelayanan administratif kepada masyarakat. Tantangan pembangunan di wilayah Kecamatan Jatiyoso antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar dan sosial yang merata.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Jatiyoso.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika

Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Subbab ini menjelaskan alasan atau urgensi disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Subbab ini memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Subbab ini menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Subbab ini menggambarkan struktur atau susunan isi dari dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Pada subbab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya, serta kelompok sasaran layanan. Pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- 2.3. Pada subbab ini paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
Subbab ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama periode Renstra (biasanya 5 tahun). Tujuan adalah pernyataan umum tentang arah pembangunan atau hasil jangka menengah yang akan dicapai.
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Subbab ini merinci sasaran sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan biasanya dapat diukur.
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
Subbab ini menjelaskan cara atau pendekatan umum yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Subbab ini menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan atau fokus kegiatan yang akan diambil dalam rangka menjalankan strategi dan mencapai sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikator dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Kecamatan dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun uraian tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerin tahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

7. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 menunjukkan distribusi 12 orang PNS di Kecamatan Jatiyoso tahun 2024 menurut golongan. Golongan II memiliki 4 orang PNS laki-laki. Golongan III merupakan yang terbanyak dengan 7 orang, yaitu 4 laki-laki dan 3 perempuan. Golongan IV hanya memiliki 1 orang PNS laki-laki. Tidak terdapat PNS pada Golongan I. Secara keseluruhan, jumlah PNS di kecamatan ini adalah 12 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 3 perempuan.

Tabel 2.1.

Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Sesuai Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	0
2	Golongan II	4	0	4
3	Golongan III	4	3	7
4	Golongan IV	1	0	1
Jumlah			3	12

Pada Tabel 2.2 ditunjukkan jumlah PNS di Kecamatan Jatiyoso tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan. Dari total 10 PNS, mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 4 orang (2 laki-laki dan 2 perempuan), diikuti lulusan SMA sederajat sebanyak 3 orang (semuanya laki-laki). Terdapat pula 2 PNS bertingkat S2 (1 laki-laki dan 1 perempuan) serta 1 PNS lulusan D3 (perempuan). Tidak ada PNS yang hanya berpendidikan SMP sederajat. Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar PNS di Kecamatan Jatiyoso telah memiliki pendidikan sarjana atau lebih tinggi untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten
Karanganyar Sesuai Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	3	0	3	0
3	D3	0	1	0	0
4	S1	2	2	2	2
5	S2	1	1	1	1
Jumlah		6	4	6	5

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Jatiyoso kini dilengkapi dengan 1 unit tanah dan bangunan kantor permanen. Mobilitas operasional lapangan terjamin oleh 1 unit station wagon dan 7 unit sepeda motor, ditambah 3 unit alat pemeliharaan tanaman yang memudahkan perawatan ruang terbuka kantor.

Kegiatan administrasi dan arsip tertangani dengan baik berkat 8 unit almari besi, 1 rak besi, 1 rak kayu, serta 10 unit filling besi untuk arsip dinamis. Selain itu terdapat 5 unit lemari kayu, 1 unit lemari pakaian, dan 7 unit lemari arsip khusus. Ruang kerja dan rapat pun terfasilitasi dengan 5 meja rapat, 7 meja pejabat, 30 meja kayu, 2 meja tamu biasa, dan 1 meja tamu di ruang pejabat eselon IV; kursi rapat tersedia 100 unit, kursi tamu 8 unit, kursi biasa 9 unit, kursi pejabat 5 unit, kursi pejabat eselon IV 13 unit, serta kursi putar 39 unit.

Sarana teknologi informasi dan presentasi terdiri dari 8 unit PC desktop, 11 laptop, 10 printer, 1 monitor, 1 handycam, 1 mesin scanner, dan 1 unit CCTV untuk keamanan dan pemantauan. Untuk mendukung presentasi dan komunikasi tersedia pula 1 sound system, 1 televisi, 1 dispenser, dan 1 mimbar/podium. Fasilitas kenyamanan kantor dipenuhi dengan 1 kipas angin, 1 kulkas, 1 set peralatan rumah tangga kantor, serta 3 unit alat pemadam kebakaran portabel. Dengan total 40 jenis barang yang terinventarisasi dan semuanya dalam kondisi baik, Kecamatan Jatiyoso siap menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan secara optimal.

Tabel 2.3.
Jumlah Aset yang Dimiliki Kecamatan Jatiyoso Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Station Wagon	1	Baik
3	Sepeda Motor	7	Baik
4	Alat Pemeliharaan Tanaman Lainnya	3	Baik
5	Almari Besi/Metal	8	Baik
6	Rak Besi/Metal	1	Baik
7	Rak Kayu	1	Baik
8	Filling Besi/Metal	10	Baik
9	Perkakas Kantor	1	Baik
10	Papan Pengumuman	2	Baik
11	Lemari Kayu	5	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4
12	Meja Rapat	5	Baik
13	Meja Pejabat	7	Baik
14	Meja Kayu	30	Baik
13	Kursi Rapat	100	Baik
16	Kursi Tamu	8	Baik
17	Kursi Biasa	9	Baik
18	Kursi Pejabat	5	Baik
19	Kursi Pejabat Eselon IV	13	Baik
20	Kursi Putar	39	Baik
21	Lemari Pakaian	1	Baik
22	Kipas Angin	1	Baik
23	Kulkas	1	Baik
24	Televisi	1	Baik
25	Sound System	1	Baik
26	Dispencer	1	Baik
27	Mimbar/Podium	1	Baik
28	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik
29	P.C.Unit	8	Baik
30	LapTop	11	Baik
31	Printer	10	Baik
32	Monitor	1	Baik
33	Meja Tamu Biasa	1	Baik
34	Meja Tamu Biasa	1	Baik
35	Kursi Tamu Diruang Pejabat Ess	2	Baik
36	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7	Baik
37	Handycam	1	Baik
38	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
39	Mesin Scanner	1	Baik
40	CCTV-Camera Control Television	1	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang relatif baik meskipun terdapat dinamika capaian pada beberapa indikator. Nilai SAKIP secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan pada tahun 2022 hingga 2023 dengan capaian di atas 100 persen, mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola kinerja dan akuntabilitas perangkat kecamatan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 98,68 persen, yang mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terkait konsistensi penerapan sistem akuntabilitas, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) memperlihatkan tren positif dengan kenaikan skor dari 0,65 pada tahun 2020 menjadi 0,712 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa di wilayah Kecamatan Jatiyoso. Namun, capaian tahun 2024 menunjukkan persentase sedikit di bawah target (99,41 persen), yang berarti masih terdapat aspek pembangunan desa yang memerlukan perhatian, seperti kemandirian ekonomi desa dan kualitas pelayanan dasar. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mendorong sinergi antara kecamatan dan

pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren yang konsisten baik, dengan kenaikan signifikan dari 78,70 pada tahun 2020 menjadi 87,70 pada tahun 2022, dan capaian tersebut mampu dipertahankan hingga 2024. Konsistensi ini menandakan bahwa masyarakat menilai pelayanan kecamatan semakin memuaskan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun kualitas layanan. Namun, stagnasi nilai IKM pada angka 87,70 dalam tiga tahun terakhir dapat menjadi sinyal perlunya inovasi pelayanan publik agar kepuasan masyarakat tidak hanya stabil tetapi juga terus meningkat. Inovasi pelayanan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan mekanisme umpan balik masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di masa mendatang.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiyoso
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	Skor	65	70	90	67	72,57	100	69	70,4	102,03	70	71,05	101,5	72	71,05	98,68
Indeks Desa Membangun	Skor	Na	0,65	Na	Na	0,68	Na	Na	0,7	Na	Na	0,7005	Na	0,712	0,7078	99,41
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Na	78,70	Na	Na	81,40	Na	Na	87,70	Na	Na	87,70	Na	Na	87,70	Na

Capaian indikator program Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang relatif stabil dengan tingkat ketercapaian yang sangat tinggi. Hampir seluruh indikator kinerja seperti persentase indikator OPD yang tercapai, persentase wilayah dalam keadaan kondusif, peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan, keaktifan lembaga kemasyarakatan, hingga kepatuhan desa/kelurahan terhadap perda, mampu mencapai angka 100 persen setiap tahunnya. Konsistensi ini memperlihatkan kuatnya kinerja kelembagaan kecamatan dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ketertiban umum di wilayahnya.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi satu-satunya indikator yang menunjukkan dinamika capaian. Nilai IKM mengalami peningkatan dari 78,70 pada tahun 2020 menjadi 87,70 pada tahun 2022 dan stabil hingga 2023. Bahkan, pada tahun 2024 realisasi IKM mencapai 87,70 dengan target 81,00 sehingga persentase capaian meningkat hingga 108,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berhasil memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat. Namun, stagnasi nilai IKM dalam tiga tahun terakhir perlu diperhatikan, sebab meskipun capaian melampaui target, peningkatan kualitas pelayanan idealnya terus berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberhasilan Kecamatan Jatiyoso dalam mencapai target indikator program menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang kuat, pengelolaan potensi wilayah yang efektif, serta terpeliharanya harmoni sosial. Namun demikian, capaian yang seragam pada angka 100 persen berpotensi menyembunyikan tantangan riil di lapangan apabila tidak dilakukan evaluasi kualitatif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa keberhasilan capaian indikator benar-benar mencerminkan kondisi faktual dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

Tabel 2.5.
Capaian Indikator Program Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Na	78,70	Na	Na	81,40	Na	Na	87,70	Na	Na	87,70	Na	81,00	87,70	108,27
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Wawasan Kegiatan Wawasan Kebangsaan Dan Keagamaan Yang Terkondisikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase desa/kelurahan tertib perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Capaian anggaran Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2021–2024 menunjukkan pola yang cukup stabil dengan mayoritas program berhasil mencapai target anggaran 100 persen setiap tahunnya. Program seperti Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Pembinaan dan Pengawasan Desa secara konsisten terealisasi penuh sesuai perencanaan. Hal ini menandakan adanya perencanaan anggaran yang realistis serta pelaksanaan kegiatan yang efektif, terutama dalam mendukung kelancaran fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dinamika terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang realisasinya sempat berada di bawah target pada tahun 2022 (78,7 persen) dan 2023 (86,01 persen). Ketidakefektifan serapan anggaran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian kegiatan akibat perubahan kebijakan, adanya efisiensi belanja, atau keterlambatan pelaksanaan program. Meskipun demikian, capaian program ini kembali membaik pada tahun 2024 dengan tingkat realisasi 98,15 persen, menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan penyelesaian hambatan teknis di tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian anggaran Kecamatan Jatiyoso menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang cukup baik, dengan tingkat efektivitas pelaksanaan program yang tinggi. Ke depan, konsistensi realisasi anggaran dapat terus dipertahankan melalui penguatan mekanisme perencanaan yang adaptif, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan, serta pengawasan berlapis untuk mencegah keterlambatan atau hambatan administrasi. Dengan demikian, anggaran kecamatan tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.

Tabel 2.5
Tabel Capaian Anggaran Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

No.	Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.940.812.000	1.940.812.000	100	2.331.774.450	2.137.499.165	78,7	2.516.981.760	2.339.557.097	86,01	2.388.513.220	2.230.045.219	98,15
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.984.000	3.984.000	100	2.499.900	2.499.900	100	7.101.900	7.101.900	100	7.333.450	7.333.450	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.315.500	26.315.500	100	26.503.400	26.503.400	100	213.052.600	213.052.600	100	61.443.100	61.443.100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.000.000	34.000.000	100	201.857.500	201.857.500	100	31.321.500	31.321.500	100	36.810.000	36.810.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.930.500	49.930.500	100	134.919.800	134.919.800	100	103.323.000	103.323.000	100	86.089.865	86.089.865	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	22.000.000	22.000.000	100	19.253.700	19.253.700	100	15.250.000	15.250.000	100	19.315.000	19.315.000	100

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum merupakan kelompok sasaran utama dari layanan kecamatan. Mereka mencakup seluruh warga yang berdomisili atau memiliki kepentingan administratif di wilayah kecamatan, termasuk penduduk tetap, pendatang, dan kelompok rentan. Kecamatan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat umum, antara lain pengantar administrasi kependudukan (seperti KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah), surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, dan surat pengantar lainnya. Selain itu, kecamatan juga menjadi tempat masyarakat mengajukan pengaduan, konsultasi, serta mendapatkan informasi terkait pelayanan publik. Peran kecamatan adalah memudahkan akses warga terhadap layanan pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan berlangsung cepat, akuntabel, dan transparan.

2. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Pemerintah desa dan kelurahan, termasuk kepala desa, lurah, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan kelompok sasaran penting yang dibina oleh kecamatan. Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Layanan yang diberikan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (seperti RKPDDes dan APBDes), evaluasi kinerja pemerintah desa, pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa, serta penyampaian kebijakan pemerintah kabupaten ke tingkat desa. Kecamatan juga membantu menyelesaikan permasalahan antarwarga atau antarlembaga desa serta memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan kelurahan.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan meliputi organisasi-organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), kelompok tani, kelompok perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kecamatan memiliki tugas untuk membina dan memfasilitasi kegiatan lembaga-lembaga ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan yang diberikan dapat berupa pelatihan kapasitas kelembagaan, penyediaan informasi program pemerintah, fasilitasi kegiatan gotong royong, dan penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat. Peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menjembatani pemerintah dengan warga, sehingga kecamatan berkewajiban memperkuat peran serta mereka melalui pendekatan partisipatif dan inklusif.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah

yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

Tabel 2.7.
Permasalahan Kecamatan Jatiyoso
Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten • Beban kerja antar pegawai belum seimbang
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarpras pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

2.2.2. Isu Strategis

Berkaitan dengan peran Kecamatan Jatiyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Isu Strategis Kecamatan Jatiyoso
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jatiyoso	Permasalahan Kecamatan Jatiyoso	Isu KKLHS yang Relevan Dengan Kecamatan Jatiyoso	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jatiyoso			Isu Strategis Kecamatan Jatiyoso
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
•Pertanian pangan menjadi basis utama dengan lahan sawah produktif yang menghasilkan padi, jagung, dan palawija. •Perkebunan dan hortikultura memiliki potensi besar melalui komoditas tebu, kelapa, tanaman keras, serta pemanfaatan lahan kering. •Peternakan berkembang dengan dukungan kelompok ternak masyarakat, meliputi sapi, kambing, ayam, dan itik. •Industri rumah tangga dan usaha lokal tumbuh melalui produk olahan pangan, kerajinan, serta kegiatan ekonomi desa yang memanfaatkan tenaga kerja produktif. •Pariwisata dan budaya desa didukung oleh tradisi lokal, wisata religi, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur desa seperti jalan dan irigasi.	•Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi •Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal •Fasilitas pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	•Peningkatan angka Kemiskinan •Rendahnya Daya Saing Ekonomi	•Geopolitik dan Geoekonomi	•Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. •Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. •Aging population negara maju.	•Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	•Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **“Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa”**. Hal ini disebabkan oleh :

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pasangan Kepala Daerah terpilih telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 20 Februari 2025. Masa jabatan mereka akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2030. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR : Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih:

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi 4. Merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD, disampaikan bahwa tujuan perangkat daerah disusun dengan memperhatikan NSPK kementerian dan tujuan serta sasaran daerah. Tujuan daerah yang diacu dalam penyusunan Renstra adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sasaran Daerah Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah maka tujuan renstra Kecamatan Karanganyar adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan. Dalam rangka mencapai tujuan diatas sasaran yang dirumuskan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dijabarkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2029

Misi 4	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	72,70	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai	87,70	87,75	87,80	87,85	87,90	87,95	88,00

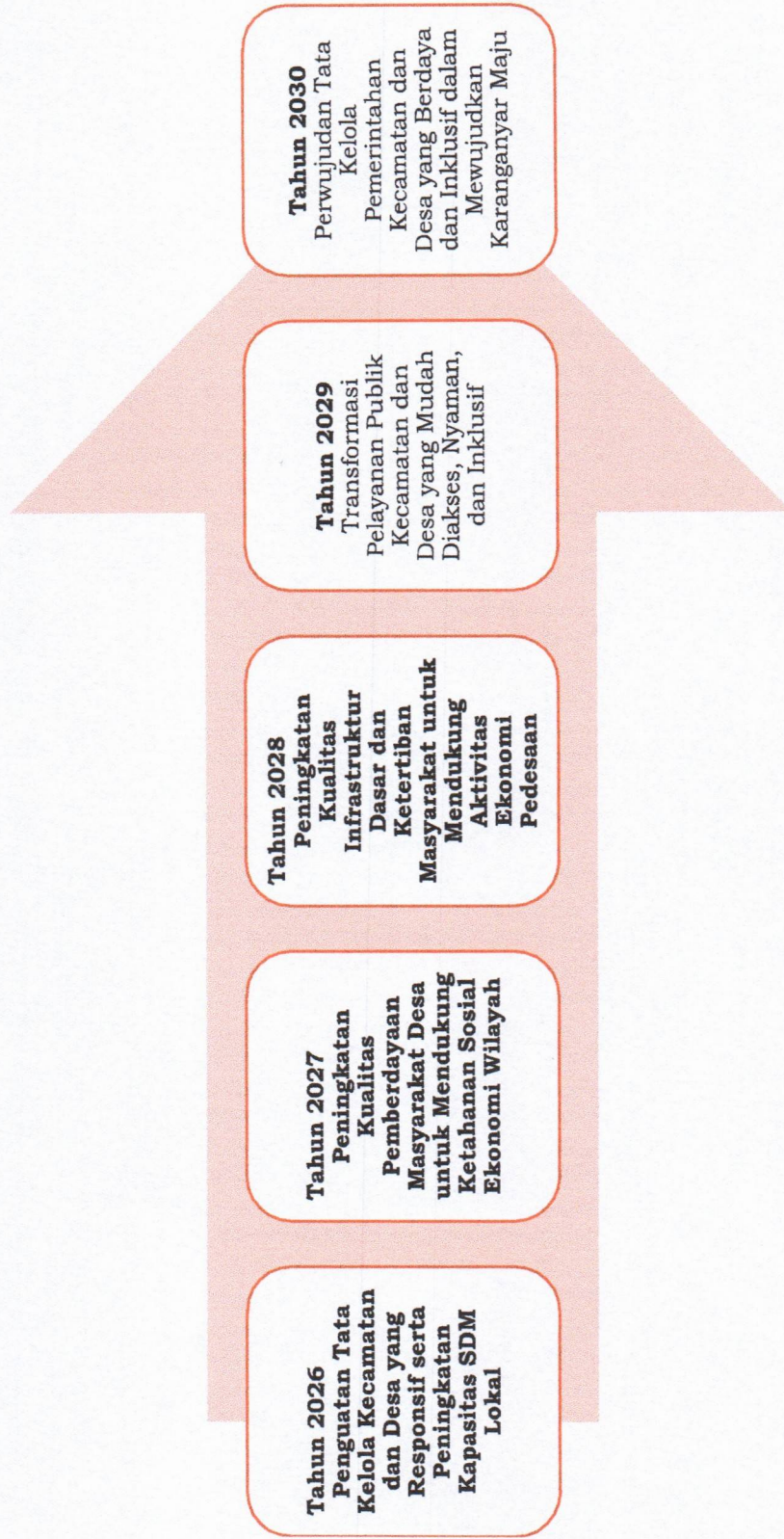
3.2. Strategi

Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program-program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (*outcome*) dari program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Seluruh strategi dan arah kebijakan dirancang berdasarkan tugas dan fungsi dinas.

Dalam rangka meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pemerintahan, Kecamatan Jatiyoso menetapkan beberapa strategi utama yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan karakter wilayah perdesaan.

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. Sarana pelayanan di tingkat kecamatan maupun desa juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital guna mempermudah akses dan efisiensi layanan.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia baik di lingkungan kecamatan maupun pemerintah desa dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis. Langkah ini bertujuan menciptakan aparatur yang profesional, komunikatif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa menjadi bagian penting strategi. Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan LPMD, serta penguatan infrastruktur pelayanan publik di desa guna mendukung pelaksanaan program kecamatan secara efektif dan partisipatif.
4. Kecamatan Jatiyoso terus memperkuat koordinasi dengan unsur keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP, serta membina sistem keamanan lingkungan melalui Linmas, RT, dan RW. Di sisi lain, pembinaan wawasan kebangsaan bersama tokoh agama dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dan menjaga kerukunan masyarakat desa.



Gambar 3.1.
Tema Prioritas Pembangunan Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026-2030

Tabel 3.2.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026) (1)	Tahap II (2027) (2)	Tahap III (2028) (3)	Tahap IV (2029) (4)	Tahap V (2030) (5)
Penguatan Tata Kelola Kecamatan dan Desa yang Responsif serta Peningkatan Kapasitas SDM Lokal	Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Mendukung Ketahanan Sosial Ekonomi Wilayah	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Ketertiban Masyarakat untuk Mendukung Ekonomi Pedesaan	Transformasi Pelayanan Publik Kecamatan dan Desa yang Nyaman, Mudah Diakses, dan Inklusif	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang BERDAYA dan INKLUSIF Menuju Jatiyoso yang Maju
• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik Kecamatan dan Pemerintah Desa yang mendukung pelayanan cepat, inklusif, dan menjangkau seluruh masyarakat. • Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis data dan partisipatif di tingkat kecamatan dan desa. • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis, digitalisasi administrasi, dan penguatan etika pelayanan publik. • Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan dan desa	• Penguatan kelembagaan desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan LPMD sebagai mitra strategis dalam pembangunan partisipatif berbasis potensi lokal. • Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat desa melalui dukungan UMKM, koperasi desa, BUMDes, dan pelatihan kewirausahaan, berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. • Penguatan peran RT	• Peningkatan kualitas infrastruktur dasar antar desa (jalan usaha tani, jembatan, saluran irigasi, dan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat). • Peningkatan kapasitas dan peran Satlinmas desa serta pembentukan forum komunikasi keamanan masyarakat desa. • Penguatan peran RT dan RW dalam mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban, serta menjaga keamanan lingkungan berbasis gotong royong. • Penguatan koordinasi	• Penguatan sistem pelayanan publik di kecamatan dan desa yang ramah, mudah, memperhatikan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan difabel. • Penerapan layanan digital dan integrasi data pelayanan desa untuk efisiensi dan kemudahan akses masyarakat. • Pemberdayaan masyarakat secara inklusif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. • Penguatan ketertiban dan keamanan melalui kolaborasi dengan warga dan tokoh desa dalam	• Penguatan pelayanan publik di kecamatan dan desa yang ramah, mudah, cepat, serta inklusif berbasis teknologi dan keterlibatan masyarakat. • Terwujudnya lingkungan desa yang aman, tertib, dan harmonis sebagai fondasi pembangunan wilayah berkelanjutan. • Kelembagaan kecamatan dan desa yang adaptif, kolaboratif, dan profesional dalam

Tahap I (2026) (1)	Tahap II (2027) (2)	Tahap III (2028) (3)	Tahap IV (2029) (4)	Tahap V (2030) (5)
dalam tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik berbasis transparansi dan partisipasi.	dan RW dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, aktif, dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat.	antara kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, dan Satpol PP dalam menjaga ketenteraman wilayah. • Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antarumat beragama melalui forum lintas tokoh masyarakat dan kegiatan sosial desa.	penyelesaian konflik sosial secara musyawarah. • Penguatan peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik dan keamanan berbasis komunitas.	mendukung pembangunan Karanganyar Baru yang berakar dari kekuatan lokal Jatiyoso.

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Jatiyoso dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat difokuskan pada :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis dan digitalisasi layanan publik.
2. Mendorong perencanaan pembangunan partisipatif berbasis data di tingkat desa dan kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana pelayanan publik agar lebih ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan desa yang transparan dan terukur.
5. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang Taruna, LPMD, BPD) dalam pelaksanaan program pembangunan.
6. Memfasilitasi pengembangan UMKM desa melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan promosi produk lokal.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa (BUMDes, koperasi desa) agar berperan aktif dalam penguatan ekonomi keluarga.
8. Mengoptimalkan peran RT/RW sebagai penggerak sosial dan pelapor permasalahan sosial ekonomi di lingkungan.
9. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi) yang mendukung konektivitas antar desa dan kegiatan ekonomi warga.
10. Memperkuat peran linmas desa dan koordinasi tiga pilar (Kecamatan, TNI, Polri) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.
11. Mendorong inisiatif keamanan berbasis masyarakat melalui forum warga dan sistem pelaporan RT/RW.
12. Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan lintas agama dan budaya.
13. Mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
14. Mengembangkan layanan publik berbasis satu pintu di kecamatan dengan pendekatan ramah dan inklusif.
15. Melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik.
16. Membangun sistem pengaduan masyarakat yang aktif, cepat tanggap, dan terbuka.
17. Membangun ekosistem pemerintahan desa dan kecamatan yang kolaboratif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
18. Mewujudkan kecamatan dan desa yang mandiri secara kelembagaan dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah.
19. Mendorong integrasi data, program, dan kebijakan antara kecamatan dan desa sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.
20. Menyusun standar pelayanan minimal bersama desa untuk memastikan kesetaraan layanan dasar di seluruh wilayah Jatiyoso.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025-2029

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan RPJMD (4)	Arah Kebijakan Renstra PD (5)	Ket (6)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. • Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia baik di lingkungan kecamatan maupun pemerintah desa dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis. • Pemberdayaan masyarakat dan	• Peningkatan pelayanan administrasi pertanian dengan fokus perbaikan sistem informasi manajemen pertanian; • Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi; • Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemitatan kemantapan kelembagaan, kebijakan yang mampu menyelesaikan problem daerah dan pro rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi,	• Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis dan digitalisasi layanan publik. • Mendorong perencanaan pembangunan partisipatif berbasis data di tingkat desa dan kecamatan. • Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana pelayanan publik agar lebih ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. • Membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan desa yang transparan dan terukur. • Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat desa (PKK, Karang Taruna, LPMD, BPD) dalam pelaksanaan program pembangunan. • Memfasilitasi pengembangan UMKM desa melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan promosi produk lokal. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa (BUMDes, koperasi desa) agar berperan aktif dalam penguatan ekonomi keluarga.	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan RPJMD (4)	Arah Kebijakan Renstra PD (5)	Ket (6)
		penguatan kelembagaan desa menjadi bagian penting strategi. Kecamatan Jatiyoso terus memperkuat koordinasi dengan unsur keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP, serta membina sistem keamanan lingkungan melalui Linmas, RT, dan RW.	nyaman, dan murah; - Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas <i>Smart City</i>, dan kualitas layanan aduan masyarakat; - Peningkatan pengelolaan kearsipan difokuskan pada peningkatan kearsipan sesuai standar dan digitalisasi arsip; - Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral; - Peningkatan keamanan informasi daerah; - Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan	- Mengoptimalkan peran RT/RW sebagai penggerak sosial dan pelapor permasalahan sosial ekonomi di lingkungan. - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi) yang mendukung konektivitas antar desa dan kegiatan ekonomi warga. - Menguatkan peran linmas desa dan koordinasi tiga pilar (Kecamatan, TNI, Polri) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan. - Mendorong inisiatif keamanan berbasis masyarakat melalui forum warga dan sistem pelaporan RT/RW. - Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan lintas agama dan budaya. - Mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat desa. - Mengembangkan layanan publik berbasis satu pintu di kecamatan dengan pendekatan ramah dan inklusif.	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan RPJMD (4)	Arah Kebijakan Renstra PD (5)	Ket (6)
			mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat; • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset yang mendorong PAD; • Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko; • Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa difokuskan pada peningkatan kualitas e-procurements, kualitas sarana dan prasarana; • Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan;	• Melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik. • Membangun sistem pengaduan masyarakat yang aktif, cepat tanggap, dan terbuka. • Membangun ekosistem pemerintahan desa dan kecamatan yang kolaboratif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan. • Mewujudkan kecamatan dan desa yang mandiri secara kelembagaan dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah. • Mendorong integrasi data, program, dan kebijakan antara kecamatan dan desa sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. • Menyusun standar pelayanan minimal bersama desa untuk memastikan kesetaraan layanan dasar di seluruh wilayah Jatiyoso.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

- b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dalam rangka mencapai program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam program ini sebagai berikut:

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menangani tentang kebutuhan rutin untuk mendukung kelancaran administrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mencapai program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup dalam program ini sebagai berikut:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1.
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jatiyoso

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai IKM		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif.			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
		dan kelurahan				
			Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya koordinasi dan ketertiban umum			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
		urusan pemerintahan umum				
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			• Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		• Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
			Regional, dan Nasional • Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas APBDes dan RKPDdes yang sesuai ketentuan			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			• Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa • Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa • Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa • Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa • Terlaksananya Fasilitasi		• Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa • Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
			Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
		Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Tersedianya kualitas administrasi kepegawaian		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
			perangkat daerah			
			• Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			• Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Tersedianya Bahan Logistik Kantor • Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan • Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Tersedianya Bahan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Tersedianya Arsip Penatausahaan SKPD		• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
			Meningkatnya sarana prasarana sesuai standar		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			- Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Tersedianya Mebel - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya - Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Outcome (3)	Output (4)	Indikator (5)	Program/Kegiatan Subkegiatan (6)	Ket (7)
			Dinas Jabatan • Terlaksananya Pemeliharaan Mebel • Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jabatan. • Pemeliharaan Mebel • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. • Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	72,70	80,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	87,70	87,80		87,80		87,85		87,90		87,95		88,00		
7.01.02 PROGRAM PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100,00	100,00	41.925.650,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	100,00	6.362.300,00	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	Kegiatan	Na	12,00	41.925.650,00	12,00	6.362.300,00		6.362.300,00		6.362.300,00		6.362.300,00		6.362.300,00	
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Na	12,00	41.925.650,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	12,00	6.362.300,00	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Persen	100,00	100,00	199.359.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	100,00	18.846.400,00	
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	Lembaga	9,00	9,00	199.359.400,00	9,00	18.846.400,00	9,00	18.846.400,00	9,00	18.846.400,00	9,00	18.846.400,00	9,00	18.846.400,00	
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	9,00	9,00	99.359.400,00	9,00	8.846.400,00	9,00	8.846.400,00	9,00	8.846.400,00	9,00	8.846.400,00	9,00	8.846.400,00	
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Laporan	12,00	15,00	100.000.000,00	15,00	10.000.000,00	15,00	10.000.000,00	15,00	10.000.000,00	15,00	10.000.000,00	15,00	10.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi dan ketertiban umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100,00	100,00	131.872.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketertaman dan ketertiban umum	Wilayah	9,00	9,00	131.872.000,00	9,00	6.000.000,00	9,00	6.000.000,00	9,00	6.000.000,00	9,00	6.000.000,00	9,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12,00	4,00	131.872.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	4,00	6.000.000,00	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	99,00	99,00	108.106.800,00	99,00	80.807.000,00	99,50	80.807.000,00	99,80	80.807.000,00	99,80	80.807.000,00	100,00	80.807.000,00	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Daerah	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	Kegiatan	4,00	4,00	108.106.800,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	4,00	80.807.000,00	
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Orang	100,00	100,00	72.106.800,00	100,00	51.600.000,00	100,00	51.600.000,00	100,00	51.600.000,00	100,00	51.600.000,00	100,00	51.600.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	35,00	40,00	8.000.000,00	40,00	4.000.000,00	40,00	4.000.000,00	40,00	4.000.000,00	40,00	4.000.000,00	40,00	4.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen			28.000.000,00		25.207.000,00		25.207.000,00		25.207.000,00		25.207.000,00		25.207.000,00	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00	61.380.000,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00	61.380.000,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	100,00	19.064.100,00	
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	9,00	9,00	11.380.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9,00	9,00	18.000.000,00	9,00	5.940.000,00	9,00	5.940.000,00	9,00	5.940.000,00	9,00	5.940.000,00	9,00	5.940.000,00	
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	Dokumen	9,00	9,00	22.000.000,00	9,00	4.199.100,00	9,00	4.199.100,00	9,00	4.199.100,00	9,00	4.199.100,00	9,00	4.199.100,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	9,00	9,00	6.000.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	
7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengkangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengkangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengkangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	9,00	9,00	4.000.000,00	9,00	2.625.000,00	9,00	2.625.000,00	9,00	2.625.000,00	9,00	2.625.000,00	9,00	2.625.000,00	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	Nilai	71,70	72,00	2.044.153.394,00	73,20	2.248.115.136,00	73,50	2.248.115.136,00	73,50	2.248.115.136,00	73,80	2.248.115.136,00	74,00	2.248.115.136,00	
7.01.01.2.01 Perencanaan, dan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Dokumen	18,00	18,00	14.000.000,00	18,00	14.000.000,00	18,00	14.000.000,00	18,00	14.000.000,00	18,00	14.000.000,00	18,00	14.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	9.500.000,00	6,00	9.500.000,00	6,00	9.500.000,00	6,00	9.500.000,00	6,00	9.500.000,00	6,00	9.500.000,00	
7.01.01.2.01.0002 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	12,00	4.500.000,00	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	1.467.647.846,00	100,00	1.671.609.648,00	100,00	1.671.609.648,00	100,00	1.671.609.648,00	100,00	1.671.609.648,00	100,00	1.671.609.648,00	
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14,00	15,00	1.467.647.846,00	15,00	1.671.609.648,00	15,00	1.671.609.648,00	15,00	1.671.609.648,00	15,00	1.671.609.648,00	15,00	1.671.609.648,00	
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35,00	35,00	15.000.000,00	35,00	15.000.000,00	35,00	15.000.000,00	35,00	15.000.000,00	35,00	15.000.000,00	35,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas umum perangkat daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	Persen	100,00	100,00	81.280.000,00	100,00	81.280.000,00	100,00	81.280.000,00	100,00	81.280.000,00	100,00	81.280.000,00	100,00	81.280.000,00		
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	5.500.000,00	12,00	5.500.000,00	12,00	5.500.000,00	12,00	5.500.000,00	12,00	5.500.000,00	12,00	5.500.000,00		
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24,00	24,00	2.780.000,00	24,00	2.780.000,00	24,00	2.780.000,00	24,00	2.780.000,00	24,00	2.780.000,00	24,00	2.780.000,00		
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12,00	12,00	8.000.000,00	12,00	8.000.000,00	12,00	8.000.000,00	12,00	8.000.000,00	12,00	8.000.000,00	12,00	8.000.000,00		
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana sesuai standar	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	Persen	100,00	100,00	47.000.000,00	100,00	47.000.000,00	100,00	47.000.000,00	100,00	47.000.000,00	100,00	47.000.000,00	100,00	47.000.000,00		
7.01.01.2.07.0001	Tersedianya	Jumlah Unit	Unit	0,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00		

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket				
					2025			2026			2027			2028			2029			2030	
					Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu		Target	Pagu
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																			
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	2,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.08 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	100,00	355.695.488,00	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	12,00	335.695.488,00	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Persen	100,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	100,00	63.530.000,00	
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	5,00	16.400.000,00	
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	5,00	3.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	5,00	3.630.000,00	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00		

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	✓ Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ✓ Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ✓ Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ✓ Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ✓ Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	✓ Terlaksananya tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. ✓ Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan serta pengelolaan potensi lokal. ✓ Meningkatnya sinergi dan respon cepat kecamatan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor. ✓ Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan umum. ✓ Meningkatnya kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui	A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembinaan dan pengawasan yang terarah.	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa • Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa • Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Berikut ini dukungan Kecamatan Jatiyoso pada 35 Program

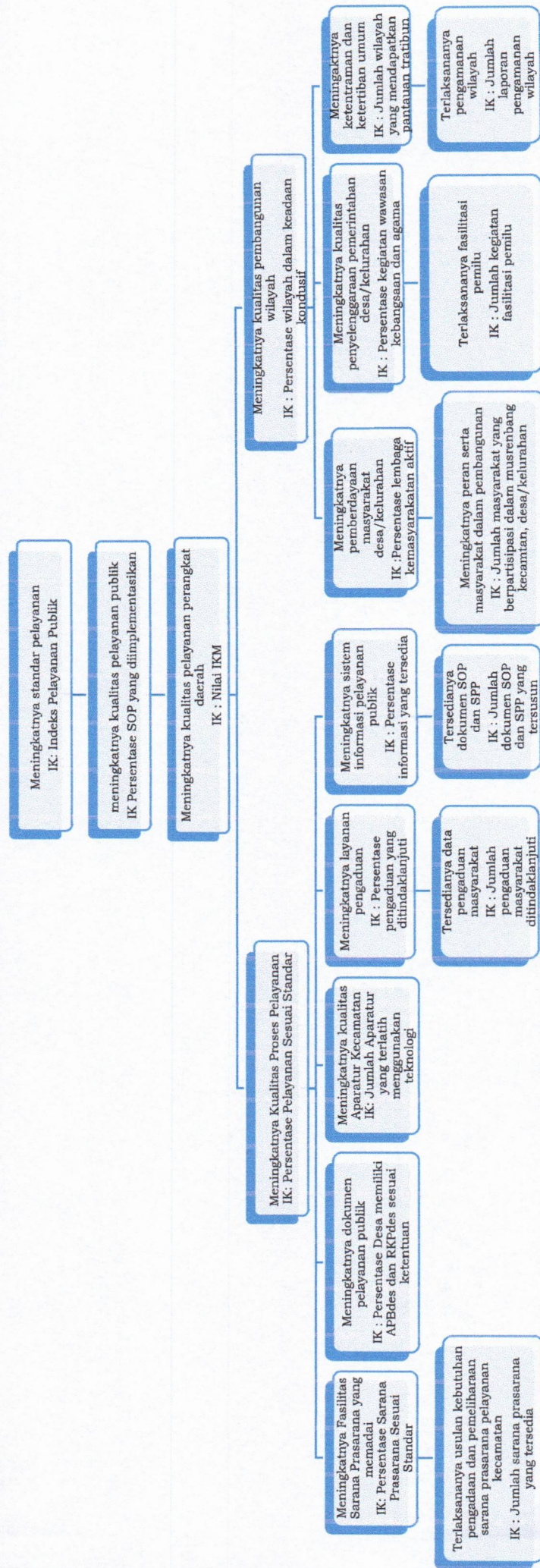
Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota:

Tabel 4.4.
Dukungan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso Terhadap 35
Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke
Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kewilayahan (Kecamatan)
2	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru		Kewilayahan (Kecamatan)
3	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)		Kewilayahan (Kecamatan)
	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		Kewilayahan (Kecamatan)
4	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya		Kewilayahan (Kecamatan)
5	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata		Kewilayahan (Kecamatan)

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Urusan
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Secara ringkas dukungan (OPD) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :



Gambar 4.1. Pohon Kinerja Kecamatan Jatiyoso

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai IKM	Nilai	87,70	87,75	87,80	87,85	87,90	87,95	88,00

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jatiyoso akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Risiko

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis Kecamatan Jatiyoso sebagaimana peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Jatiyoso, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

